

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

Intervening Alokasi Belanja Pada Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Jawa Tengah

Syafnita Wartiah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan

e-mail : nita_syafri@yahoo.com

Abstract.

This study aims to examine and analyze the effect of local government financial performance as measured by the independence ratio, dependency ratio, degree of decentralization, PAD effectiveness ratio, degree of BUMD contribution and debt to income ratio on capital expenditure allocation and economic growth. As well as to examine and analyze the effect of local government financial performance as measured by the independence ratio, dependency ratio, degree of decentralization, PAD effectiveness ratio, degree of BUMD contribution and debt to income ratio on economic growth to mediated capital expenditure allocation.

This research is a correlational study with a causal relationship, namely to examine the effect of regional financial performance on economic growth through the allocation of capital expenditures as an intervening variable. The sample in this study was 35 Regency/City Governments in Central Java. The data analysis technique used path analysis with SEM (Structural Equation Modeling).

The results showed (1) Financial independence, financial dependence and

The degree of BUMD's contribution did not have a direct effect on the allocation of capital expenditures. The degree of decentralization, the effectiveness of PAD and the debt to income ratio have a direct and significant effect on the allocation of capital expenditures. (2)

Financial independence, degree of decentralization and effectiveness of PAD have a direct effect on economic growth. Financial dependence, degree of BUMD's contribution, debt to income ratio and capital expenditure allocation do not have a direct and significant effect on economic growth. (3) Capital expenditure allocation mediates the effect of the degree of decentralization, the effectiveness of PAD and the degree of BUMD's contribution on economic growth. However, the capital expenditure allocation does not mediate the effect of financial independence, financial dependence and the debt to income ratio to economic growth

Keywords:

Independency ratio; dependency ratio; decentralization degree; PAD effectiveness ratio; BUMD contribution degree; debt to income ratio; capital expenditure allocation and economic growth.

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat disebabkan berbagai faktor. Salah satu diantaranya adalah pengelolaan keuangan pada pemerintahan yang berjalan dengan baik. Tata kelola yang baik (*good governance*) ini akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Sejak berlakunya Undang- Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka daerah menjadi pusat pengelolaan keuangan. Daerah diharuskan mengelola keuangan secara ekonomis, efisien dan efektif. Hal ini dipertegas [10] yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan oleh pemerintah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value formoney* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kinerja keuangan pemerintah daerah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, derajat desentralisasi, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisiensi PAD, rasio efektivitas pajak daerah, rasio efisiensi pajak daerah, derajat kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), rasio utang (*Debt Service Coverage Ratio*) dan rasio utang terhadap pendapatan (*Debt to Income Ratio*).

Rasio kemandirian mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, karena rasio ini mengukur kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah daerah. Rasio

kemandirian keuangan membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer pusat, provinsi dan pinjaman. PAD merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Semakin tinggi kemandirian daerah menunjukkan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [8] yang menyatakan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan penelitian [7] dan [1] yang menyimpulkan bahwa kemandirian keuangan secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian [6] dan [9] menyimpulkan kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, digunakan untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat/propinsi. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat/propinsi. Sebaliknya semakin rendah tingkat rasio ketergantungan keuangan suatu daerah, maka dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut semakin mampu atau mandiri membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat atau memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hasil penelitian [8] yang menyimpulkan bahwa rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan penelitian [6] yang menyimpulkan rasio ketergantungan keuangan berpengaruh negatif terhadap

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian [9] menyatakan bahwa ketergantungan keuangan secara tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Derajat desentralisasi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi Halim, 2012 dalam [6]. Derajat desentralisasi memungkinkan daerah untuk dapat mengelola kemampuan keuangannya sendiri dalam rangka membiayai pembangunan di daerahnya tersebut. Pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh [6] menyatakan bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini bertentangan dengan penelitian [9] yang menyatakan bahwa derajat desentralisasi tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh [5] yang menyimpulkan derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya rasio efektivitas PAD mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar satu atau 100%. Namun demikian, semakin tinggi efektivitas

PAD maka kemampuan pemerintah daerah pun semakin baik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian [5] membuktikan bahwa efektivitas PAD berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh [8] menyimpulkan bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh [6] membuktikan rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kinerja keuangan daerah lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah derajat kontribusi BUMD. Derajat kontribusi BUMD digunakan untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah/BUMD dalam mendukung pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini berdampak pada naiknya pendapatan daerah. Semakin besar tingkat kontribusi BUMD yang dapat meningkatkan PAD, maka akan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan hasil penelitian [9] yang menyatakan bahwa derajat kontribusi BUMD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena semakin tinggi rasio ini berdampak pada naiknya pendapatan daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh [5] dan [6] yang menyatakan bahwa kontribusi BUMD tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya rasio utang terhadap pendapatan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Rasio utang terhadap pendapatan merupakan kinerja pinjaman daerah. Rasio ini menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjaman. Rasio ini sangat bermanfaat bagi pihak eksternal terutama

ENTREPRENEUR
Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka
Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941
Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

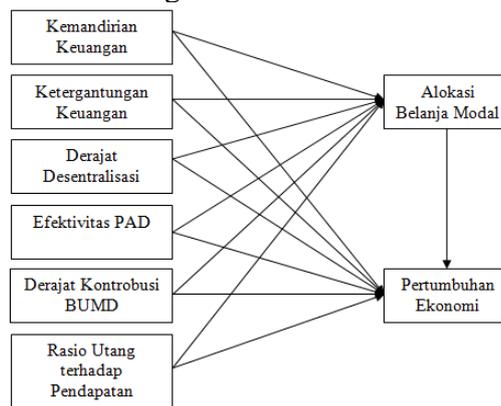
calon kreditor untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjaman. Semakin kecil rasio ini menggambarkan kemampuan daerah untuk mengembalikan pinjaman semakin baik sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Alokasi belanja modal juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi. Alokasi belanja modal yaitu pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah. Besarnya alokasi belanja modal yang digunakan untuk meningkatkan kepentingan dan kesejahteraan publik maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian sebelumnya oleh [5] dan [10] menyimpulkan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan

penelitian [7] dan [2] menyimpulkan alokasi belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Sistem otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat mengelola keuangan daerahnya sendiri. Indikator pengelolaan keuangan yang baik dapat dilihat dari kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan yang baik salah satunya dapat ditunjukkan melalui besarnya alokasi belanja modal. Alokasi belanja modal yang memadai akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kinerja keuangan yang baik juga diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kontribusi anggaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1– 6: Kemandirian keuangan, ketertgantungan keuangan, derajat desentralisasi, efektivitas PAD, derajat kontribusi BUMD dan rasio utang berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

H7–13: Kemandirian keuangan, ketertgantungan keuangan, derajat desentralisasi, efektivitas PAD, derajat kontribusi BUMD, rasio utang dan alokasi belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
H14–19: Alokasi belanja modal memediasi pengaruh Kemandirian keuangan,

ENTREPRENEUR
Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka
 Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941
 Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

ketergantungan keuangan, derajat desentralisasi, efektivitas PAD, derajat kontribusi BUMD dan rasio utang terhadap pertumbuhan ekonomi.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Obyek penelitian ini adalah 35 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Teknik analisis menggunakan analisis berjenjang (*path analys*) dengan bantuan SEM (*Structural Equation Model*). Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dari seperangkat variabel bebas

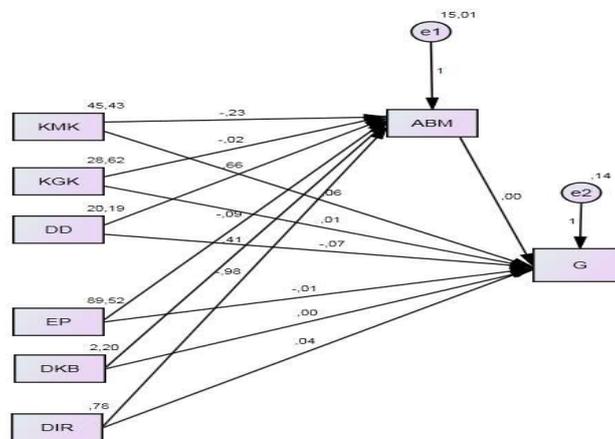
(eksogen) terhadap variabel terikat (endogen). Persamaan struktural yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ABM = \beta_1 KMK + \beta_2 KGK + \beta_3 DD + \beta_4 EP + \beta_5 DKB + \beta_6 DIR + \epsilon_1$$

$$PE = \beta_1 KMK + \beta_2 KGK + \beta_3 DD + \beta_4 EP + \beta_5 DKB + \beta_6 DIR + \beta_7 ABM + \epsilon_2$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Spesifikasi model yang dihasilkan dengan analisis SEMAMOS dapat dilihat pada gambar 2 berikut:



Gambar 2. Model Struktural Analisis SEM

Keterangan: Kemandirian Keuangan (KMK), Ketergantungan Keuangan (KGK), Derajat Desentralisasi (DD), Efektivitas PAD (EP), Derajat Kontribusi BUMD (DKB) dan Debt to Income Ratio (DIR), Alokasi Belanja Modal (ABM) dan Pertumbuhan Ekonomi (G).

1. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh nilai -0,290 dengan P-value (signifikan) sebesar 0,224 lebih besar dari

0,05, maka kemandirian keuangan tidak berpengaruh langsung terhadap Alokasi Belanja Modal (ABM). Hasil penelitian ini mendukung penelitian [2] menyatakan bahwa kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil data penelitian menunjukkan rasio kemandirian yang dimiliki sebagian besar daerah kabupaten/kota se-Jawa Tengah dalam kriteria rendah sekali (0% - 25%) artinya

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

memiliki pola hubungan instruktif. Pola hubungan instruktif, dimana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Dengan demikian kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik kepada masyarakat kurang baik sehingga pengalokasian terhadap belanja modal juga harus dipenuhi dari dana pemerintah pusat.

2. Pengaruh Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai -0,023 dengan P-value (signifikan) sebesar 0,772 lebih besar dari 0,05, maka ketergantungan keuangan tidak berpengaruh langsung terhadap Alokasi Belanja Modal (ABM). Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dijadikan acuan penelitian, yaitu penelitian [2] yang menjadi acuan penelitian ini membuktikan bahwa ketergantungan keuangan berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Ketergantungan keuangan tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, karena berdasarkan hasil data penelitian menunjukkan rasio ketergantungan keuangan yang dimiliki sebagian besar daerah kabupaten/kota se-Jawa Tengah dalam kriteria tinggi, artinya pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan keuangan dengan Pemerintah Pusat dan belum memiliki kemampuan yang baik dalam menggali potensi pendapatan daerah. Dengan demikian menunjukkan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik kepada masyarakat masih sepenuhnya tergantung dengan pemerintah pusat.

3. Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil uji hipotesis diperoleh nilai 0,560 dengan P-value (signifikan) sebesar 0,024 lebih kecil dari 0,05, maka Derajat Desentralisasi berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal (ABM). Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian [2] yang membuktikan bahwa derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Derajat Desentralisasi berpengaruh langsung terhadap Alokasi Belanja Modal (ABM). Hal ini karena perkembangan derajat desentralisasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modalnya. Namun hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh desentralisasi fiskal terhadap alokasi belanja modal dengan arah yang negatif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal, maka alokasi belanja modal daerah justru semakin rendah.

4. Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil uji hipotesis diperoleh nilai 0,154 dengan P-value (signifikan) sebesar 0,015 lebih kecil dari 0,05, maka Efektivitas PAD (EP) berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal (ABM). Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh [2] yang membuktikan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh Efektivitas PAD (EP) terhadap Alokasi Belanja Modal (ABM) dengan arah yang negatif. Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PAD sebagian besar pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah cenderung

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

mengalami peningkatan dan memiliki kriteria sangat efektif. Namun alokasi belanja modal yang dimiliki sebagian besar pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami fluktuasi yang menurun. Adanya pergerakan rasio efektivitas PAD dana lokasi belanja modal yang berbeda menunjukkan rasio efektivitas PAD berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.

5. Pengaruh Derajat Kontribusi BUMD terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil uji hipotesis diperoleh nilai 0,115 dengan P-value (signifikan) sebesar 0,060 lebih besar dari 0,05, maka derajat kontribusi BUMD (DKB) tidak berpengaruh langsung terhadap Alokasi Belanja Modal (ABM). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh [9] yang menyatakan bahwa kontribusi BUMD berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Derajat Kontribusi BUMD (DKB) tidak berpengaruh langsung terhadap Alokasi Belanja Modal (ABM). Hal ini berarti bahwa perkembangan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan BUMD tidak mampu memberikan efek terhadap peningkatan alokasi belanja modal pemerintah. Kondisi ini terjadi karena berdasarkan data penelitian masih minimnya kontribusi BUMD dalam penerimaan daerah. Jumlah penerimaan dari BUMD yang relatif sangat kecil (<10%) sehingga membuat jumlah penerimaan yang bersumber dari BUMD tersebut tidak mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan belanja daerahnya terutama alokasi belanja modal. Alokasi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih sangat bergantung pada komponen pendapatan lain selain pendapatan yang bersumber dari BUMD.

6. Pengaruh Rasio Utang terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil uji hipotesis diperoleh nilai - 0,164 dengan P-value (signifikan) sebesar 0,013 lebih kecil dari 0,05, maka Debt to Income Ratio (DIR) berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal (ABM). Berdasarkan data penelitian rasio utang terhadap pendapatan yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah adalah relatif kecil yaitu kurang dari 10%. Artinya dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan penggunaan dana utang relatif kecil. Rasio utang terhadap pendapatan yang relatif kecil berpengaruh negatif atau menurunkan alokasi belanja modal.

7. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji hipotesis diperoleh nilai 0,639 dengan P-value (signifikan) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka Kemandirian Keuangan berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh [8] yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan penelitian [1] menyimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemandirian Keuangan (KMK) berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (G). Hal ini dikarenakan dari hasil data penelitian menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah jumlahnya kecil dan dana perimbangan dari pemerintah pusat jumlahnya lebih besar dari realisasi pendapatan asli daerahnya pada masing-masing daerah kabupaten/kota di Jawa

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

Tengah. Sehingga dapat dikatakan pemerintah daerah belum maksimal dalam mengelola dan menggali potensi daerah berdasarkan kondisirriil daerah tersebut, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

8. Pengaruh Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji hipotesis diperoleh nilai 0,043 dengan P-value (signifikan) sebesar 0,512 lebih besar dari 0,05, maka ketergantungan keuangan tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh [6] yang menyatakan bahwa ketergantungan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh [8] menyimpulkan bahwa ketergantungan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan Keuangan (KGK) tidak berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi (G). Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah masih memiliki rasio ketergantungan yang tinggi, mengingat semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan berarti pemerintah daerah belum dapat melaksanakan desentralisasi fiskal dengan baik, sehingga pendapatan daerah menjadi kurang maksimal, maka alokasi belanja rutin belum dapat dipenuhi dan kurang dapat membelanjakannya untuk investasi daerah sehingga tidak dapat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut membuktikan bahwa ketergantungan keuangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

9. Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji hipotesis diperoleh nilai 0,475 dengan P-value (signifikan) sebesar 0,018 lebih kecil dari 0,05 maka derajat desentralisasi berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dengan arah yang negatif. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [6] yang menyatakan bahwa derajat desentralisasi secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Derajat Desentralisasi (DD) berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (G). Hal ini dikarenakan berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi sebagian besar pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki derajat desentralisasi kategori kurang atau pemerintah daerah kurang memiliki kemampuan dalam meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah. Adanya rasio desentralisasi yang kurang baik tersebut berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

10. Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji hipotesis diperoleh nilai 0,163 dengan P-value (signifikan) sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka efektivitas PAD berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh [9] yang menyatakan bahwa efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian [4] juga menyimpulkan bahwa efektivitas PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Efektivitas PAD (EP) berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Pertumbuhan

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

Ekonomi (G). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki realisasi pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dengan target pendapatan yang dialokasikan masing-masing daerah. Sehingga mampu mendorong pengembangan program-program yang dapat dialokasikan untuk menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga rasio ini mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

11. Pengaruh Derajat Kontribusi BUMD terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji hipotesis diperoleh nilai 0,007 dengan P-value (signifikan) sebesar 0,889 lebih besar dari 0,05, maka derajat kontribusi BUMD tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh [9] yang menyatakan bahwa derajat kontribusi BUMD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Derajat Kontribusi BUMD (DKB) tidak berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi (G). Hal ini dikarenakan berdasarkan data penelitian rasio derajat kontribusi BUMD yang diperoleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki realisasi bagi laba BUMD yang lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan oleh masing-masing daerah. Akibatnya penerimaan pendapatan asli daerah yang kurang maksimal yang berdampak pada tingkat kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan kecil persentasenya, sehingga rasio ini kurang mampu untuk mendorong adanya pertumbuhan ekonomi.

12. Pengaruh Rasio Utang terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji hipotesis diperoleh nilai 0,054 dengan P-value (signifikan) sebesar 0,316 lebih besar dari 0,05, maka *Debt to Income Ratio* tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan dana pinjaman yang relatif kecil dan tidak dapat dialokasikan oleh pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah menjadi ketergantungan dengan pemerintah pusat serta menjadikan anggaran tidak dialokasikan untuk belanja yang lain, sehingga rasio ini tidak mampu untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

13. Pengaruh Alokasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji hipotesis diperoleh nilai 0,012 dengan P-value (signifikan) sebesar 0,845 lebih besar dari 0,05, maka alokasi belanja modal tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dijadikan acuan penelitian, yaitu penelitian [2] yang menjadi acuan penelitian ini membuktikan bahwa alokasi belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh [5] yang menyatakan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan penelitian [10] menyimpulkan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [7] yang membuktikan Alokasi belanja modal tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian diperoleh bahwa Alokasi Belanja Modal (ABM) tidak berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi (G). Hal ini dikarenakan jumlah belanja modal yang

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

besar tidak sebanding dengan jumlah pendapatan daerah yang mengakibatkan pemerintah daerah memerlukan pinjaman atau dana transfer yang lebih besar serta belanja rutin pemerintah yang besar pula yang menjadikan pemerintah daerah tidak optimal dalam membelanjakan anggaran belanja pembangunannya. Sehingga belanja modal kurang mendorong pertumbuhan ekonomi.

14. Alokasi Belanja Modal Memediasi Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Alokasi belanja modal tidak dapat memediasi pengaruh rasio kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, hal ini dimungkinkan karena peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah) sehingga pemerintah daerah masih memiliki alokasi belanja modal yang besar, sebagian besar dana perimbangan pusat dan propinsi serta pinjaman. Rendahnya rasio kemandirian keuangan menunjukkan tingginya peran pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerah, sehingga tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian [9] yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan [1] menyimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal.

15. Alokasi Belanja Modal Memediasi Pengaruh Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Alokasi belanja modal tidak memediasi pengaruh rasio ketergantungan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, hal ini dimungkinkan karena penggunaan dana perimbangan dalam alokasi belanja modal masih relatif kecil, Sebagian besar dana perimbangan masih digunakan untuk belanja pegawai dan belanja operasional. Tingginya tingkat ketergantungan belanja daerah terhadap pendanaan dana perimbangan, menunjukkan tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pendanaan pemerintah pusat. Semakin tingginya rasio ketergantungan menunjukkan bahwa porsi dana transfer dalam pendapatan daerah semakin tinggi dan demikian pula sebaliknya. Semakin rendah rasio ketergantungan menunjukkan bahwa porsi dana transfer semakin rendah yang berarti kemampuan daerah semakin meningkat untuk melaksanakan pembangunan daerahnya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian [9] yang menyatakan bahwa ketergantungan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan penelitian [8] menyimpulkan bahwa ketergantungan keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal.

16. Alokasi Belanja Modal Memediasi Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi belanja modal memediasi pengaruh derajat desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa peningkatan derajat desentralisasi fiskal melalui mediasi alokasi belanja modal mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, derajat desentralisasi fiskal mampu meningkatkan alokasi belanja modal, sehingga memberikan efek tidak

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

langsung melalui belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hal ini sejalan dengan penelitian [9] yang menyatakan bahwa derajat desentralisasi secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal.

17. Alokasi Belanja Modal Memediasi Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Efektivitas PAD dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dimediasi oleh alokasi belanja modal. Hal ini berarti semakin efektif kinerja keuangan daerah yang berhubungan dengan pencapaian target PAD dalam APBD, kondisi tersebut mampu menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dalam penetapan alokasi belanja daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi belanja modal memediasi pengaruh efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa Hal ini berarti semakin efektif kinerja keuangan daerah yang berhubungan dengan pencapaian target PAD dalam APBD, kondisi tersebut mampu menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dalam penetapan alokasi belanja daerah. Sementara itu, belanja modal merupakan faktor yang secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan kebijakan alokasi belanja modal ditentukan oleh efektivitas kinerja keuangan pemerintah, maka belanja modal akan mampu memediasi pengaruh rasio efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hal ini sejalan dengan penelitian [5] menyatakan bahwa belanja modal

memediasi hubungan antara efektivitas PAD dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian [9] yang menyatakan bahwa efektivitas PAD secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal.

18. Alokasi Belanja Modal Memediasi Pengaruh Kontribusi BUMD terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi belanja modal memediasi pengaruh Rasio kontribusi BUMD terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena kontribusi BUMD memberikan efek terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modalnya. Selain itu Upaya dari pemerintah untuk menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki pemerintah daerah melalui BUMD dapat meningkatkan PAD, sehingga PAD tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur baik pembangunan maupun perbaikan sarana dan prasarana. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas diberbagai sektor, produktivitas masyarakat pun menjadi semakin tinggi dan pada akhirnya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut. Semakin tinggi rasio ini berdampak pada naiknya pendapatan daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [9] menyatakan bahwa belanja modal memediasi hubungan antara derajat kontribusi BUMD dengan pertumbuhan ekonomi.

19. Alokasi Belanja Modal Memediasi Pengaruh Rasio Utang terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi belanja modal tidak memediasi pengaruh Rasio utang terhadap pendapatan

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

(*debt to income ratio*) terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena Rasio utang terhadap pendapatan (*debt to income ratio*) pemerintah daerah di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah relatif kecil. Sehingga kontribusi rasio utang belum mampu memberikan efek yang signifikan dalam membiayai alokasi belanja modal. Sementara itu, pendapatan daerah yang berasal dari hasil hutang masih sangat minim.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan analisis data pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan hanya Derajat Desentralisasi, Efektivitas PAD, dan Rasio Utang yang berpengaruh langsung terhadap Alokasi Belanja Modal. Dan Variabel yang berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi adalah Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi, dan Efektivitas PAD. Selanjutnya Alokasi Belanja Modal hanya memediasi Sebagian variabel dalam penelitian ini terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya adalah lebih cermat dalam menggali potensi daerah yang dapat meningkatkan PAD, untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat seperti pengalokasian kepada belanja modal untuk penyediaan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah perlu menghitung dengan cermat besarnya pengeluaran untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima tersebut. Bagi peneliti selanjutnya supaya menggunakan faktor-faktor lainnya sebagai variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan belanja modal

seperti rasio efisiensi PAD, rasio efektivitas pajak daerah, rasio efisiensi pajak daerah dan rasio kemampuan mengembalikan pinjaman atau rasio utang (*Debt Service Coverage Ratio*).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ani, N. L. N. P. , & D. A. A. N. B. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(3), 481–497. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/8643>.
- [2] Hartono, H. M. , & Y. F. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(4), 558–568. <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/7919>.
- [4] Indiyanti, N. M. D. , & R. H. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(9), 4713–4746. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i09.p04>.
- [5] Lestari, A. A. , R. S. , & J. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 5(1), 1–15. <https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/7792>.
- [6] Pradiatmi, I. N. , & W. H. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Dan

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

- Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 759–768. <https://doi.org/10.22219/jrak.v5i2.5152>
- . <https://doi.org/10.21107/infestasi.v1i2.1127>.
- [7] Prihastuti, A. H. , T. T. , & A. R. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau. *Jurnal Sorot*, 10(2), 143–154. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i3.484>.
- [8] Sari, G. N. , K. P. , & R. T. O. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan Di Sulawesi Utara Tahun 2004-2014. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(2), 1–19. <https://doi.org/10.35794/jpekd.12789.18.2.2016>.
- [9] Sularso, H. , & R. Y. E. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, 1(2), 109–124. http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/article/view/22.
- [10] Suwandi, K. A. , & T. A. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta). *In Festasi*, 11(2), 118–136.